



# Majalah Ilmiah **AKRAWALA GALUH**

Volume I | No.4 | Maret 2011

ISSN : 2086-8111



**LPPM Universitas Galuh**

Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp. (0265) 776787 Ciamis

Email : [lppmunigal@gmail.com](mailto:lppmunigal@gmail.com)

# **C** Majalah Ilmiah **AKRAWALA GALUH**

## **Pelindung**

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh

Prof. Dr. H.S. Koswara  
( Rektor Universitas Galuh )

## **Dewan Pengarah**

Dr. H. Oyon Saryono, M.M.  
( Pembantu Rektor I )

H. Rachmat Syamsuddin, S.H., M.H.  
( Pembantu Rektor II )

Dedi Herdiansyah, Ir., M.P.  
( Pembantu Rektor III )

## **Penanggung Jawab**

Runalan, Drs., M.Si.

## **Pimpinan Redaksi**

Agus Dedi, Drs., M.Si.

## **Wakil Pimpinan Redaksi**

Dedi Sutresna, Drs., M.Si.

## **Redaktur Ahli**

Prof. Dr. H. Suryana, M.Si.  
Prof. Dr. H. Suherli, M.Pd.  
Dr. H. Toto, M.Pd.

## **Editor**

Tito Hardiyanto, S.P., M.P.  
Hendi Budiman, S.H., M.H.  
Teti Gumiaty, Dra., M.Pd.

## **Tata Letak**

Agung Prawiranagara, S.P.  
Elom Carlam Sujana

## **Tata Usaha**

R. Gardea  
Pitri Mubarok

## **Alamat Redaksi**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Jl. R.E. Martadinata No.150 Telp. (0265) 776787 Universitas Galuh Ciamis  
Email : lppmunigal@Gmail.com

## DAFTAR ISI

PENGARUH PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN  
(Survei pada Pelanggan Minimarket di Wilayah Priangan Timur)  
**Oleh : Dr. Apri Budianto, Drs., MM. – 1**

PERBANDINGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA ANTARA PERHITUNGAN MANUAL DENGAN BANTUAN APLIKASI SOFTWARE AutoCAD PADA PROYEK GEDUNG KANTOR DINAS PU KOTA BANJAR  
**Oleh: Dedi Sutrisna, Drs., M.Si. – 11**

PELAKSANAAN PEMBUANGAN LIMBAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
**Oleh : Ida Farida, SH.,MH. - 16**

PERBEDAAN KEJADIAN PLEBITIS ANTARA INFUS YANG DIDRESSING SETIAP HARI DENGAN YANG DIDRESSING TIDAK TERATUR DAN YANG TIDAK PERNAH DIDRESSING DI RSUD KABUPATEN CIAMIS  
**Oleh : Zahara Farhan, S.Kep., Ners – 24**

DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA  
**Oleh : Hj. AINI KUSNIAWATI. Dra., M. M. – 36**

PENGARUH METODE PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA MATERI PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA TINGKAT II REGULER PROGRAM STUDI KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS TAHUN 2010  
**Oleh : Nova Winda Setiati, SST – 46**

TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK  
**Oleh : Hendi Budi Aman, S.H.,M.H. – 58**

PENGARUH SUPERVISI DAN KOORDINASI TERHADAP MUTU LAYANAN DI PUSKESMAS CIHAURBETI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2010  
**Oleh : TITA ROHITA – 65**

PENGARUH KREDIBILITAS KOMUNIKATOR DAN DAYA TARIK PESAN TENTANG PELATIHAN INTERNET MASUK SEKOLAH TERHADAP SIKAP GURU SMA  
**Oleh : Zikri Fachrul Nurhadi – 71**

PENGARUH PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANJAR  
**oleh; Agus Dedi, Drs. M.Si. – 82**

JAVANESE FORMS OF ADDRESS  
**Oleh : Purwati – 91**

KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA DIBIDANG HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PENJARA BANCEUY (1836-1842)  
**Oleh: Yeni Wijayanti – 97**

MODEL-MODEL KONSEPTUAL DALAM PERAWATAN KOMUNITAS  
**Oleh : Komara Nur Ikhsan, SKM., M.Pd – 103**

# DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

Hj. AINI KUSNIAWATI, Dra., M. M.

## ABSTRAK

*Perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan baik dilihat dari struktur distribusi tingkat pendapatan rata-rata, maupun sistem kelebagaannya pada sektor publik dan swasta. Dalam upaya menyusun perekonomian yang berdaya saing tinggi, bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari arah membangun perekonomian yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, harus diperhitungkan dan dimanfaatkan kelembagaan-kelembagaan ekonomi dan politik. Di era globalisasi saat ini sistem ekonomi terbuka berkeadilan sosial. Dengan ekonomi terbuka setiap kerja sama dan kemitraan dalam ekonomi global, sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.*

## I. PENDAHULUAN

Apa itu demokrasi ekonomi Indonesia?

Arti kata demokrasi ekonomi ditinjau dari berbagai sudut pandang hingga ada bermacam penafsiran dan definisi.

“Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, berasal dari Yunani, yaitu pemerintahan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*). Selama dua ratus tahun sistem pemerintahan ini dijalankan di Atena, sampai negara kota ini diduduki oleh Macedonia. Sejak itu demokrasi tenggelam dalam sejarah dan baru muncul kembali sekitar tiga abad yang lalu sebagai konsep politik (William, 1976)”.

Menurut Ginanjar “Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Dengan lebih tegas lagi, demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dengan rumusan UUD 1945: ‘Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Warna kerakyatan dalam kehidupan ekonomi tersebut adalah sama dengan cita-cita keadilan dalam kehidupan ekonomi. Kalau kita berbicara mengenai demokrasi ekonomi pasti berbicara mengenai kedaulatan ekonomi rakyat yang

berarti berbicara mengenai keadilan ekonomi. Demokrasi ekonomi pada prinsipnya menjamin hak-hak warga negara, disertai pembatasannya, yang pada dasarnya adalah upaya mencari keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakatnya.

Dalam sejarah ada sistem monarki yang ingin dilawan dengan demokrasi (misalnya revolusi Prancis), sekarang sudah masuk kelompok demokrasi (meskipun dengan monarki diakui bahwa tidak semua orang dilahirkan sama). Seperti yang dikemukakan oleh Philip Green (1993):” *Democracy in the late twenfieth century is not only a contested concept but also a remarkably ambiguous one...virtually everyone with a claim in democracy's name*”.

Betapapun luasnya dan sangat beragamnya orang menafsirkan demokrasi, kalau dilihat pada sejarah kontemporer, pergerakan ke arah demokrasi dan kebebasan merupakan perkembangan sejarah yang paling dramatis menjelang akhir abad ini (Haggard dan Webb, 1994).

Demokrasi sering dianggap sebagai sistem dan manifestasi budaya politik Barat yang acap dicemoohkan sebagai mendatangkan “*Chaos*” dan tidak menunjang pembangunan. India juga pernah menerapkan demokrasi, banyak menghadapi kesulitan dalam perkembangan ekonominya.

Demokrasi ekonomi Indonesia menurut Ginanjar adalah “keberpihakan

yang dapat meningkatkan peran rakyat dalam perekonomian, dan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan nyata. Demokrasi ekonomi Indonesia berlandaskan pada kekeluargaan dan kebersamaan, mengandung ajaran-ajaran pengembangan individu dan masyarakat secara serasi, selaras, dan seimbang (1996:131)".

## II. PERMASALAHAN

Mengapa dengan demokrasi ekonomi Indonesia?

Demokrasi ekonomi Indonesia sebagai dasar perekonomian Indonesia untuk mewujudkan hal-hal berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang secara berkesinambungan dipelihara terus menerus meningkat rata-rata 7 % pertahun.
2. Mendorong perubahan ekonomi Indonesia dari ekonomi yang bersifat agraris ke arah ekonomi industri, dari ekonomi yang bergantung kepada sumber daya alam menuju ekonomi yang dimotori oleh sumber daya manusia, dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan, dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dan dari ekonomi yang didominasi negara menjadi ekonomi yang masyarakatnya berperan lebih besar.
3. Adanya semangat dan sikap bangsa dalam menghadapi dan mengambil keuntungan dari proses globalisasi.
4. Usaha milik negara dapat berperan sebagai perintis usaha, pengelola bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, penyeimbang kekuatan di pasar, dan penunjang pelaksanaan kebijakan negara.
5. Dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia, sasaran pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

## III. PEMBAHASAN

Mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab demokrasi ekonomi adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi

untuk mencapai tujuannya. Karena itu sampai sekarang refleksi dari demokrasi ekonomi belum dapat dicapai sepenuhnya. Belum sepenuhnya demokrasi ekonomi dilakukan, menjadikan pelaksanaan demokrasi ekonomi perlu senantiasa mengalami pembaharuan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat

"Dalam 25 tahun terakhir ini, perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan baik dilihat dari struktur distribusi tingkat pendapatan rata-rata, maupun sistem kelembagaannya pada sektor publik dan swasta. Dalam tahap pembangunan selanjutnya masyarakatlah yang akan menjadi pelaku utama pembangunan" (Ginandjar, 1996:105).

Dalam upaya menyusun perekonomian yang berdaya saing tinggi, bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari arah membangun perekonomian yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi harus diperhitungkan dan dimanfaatkan kelembagaan-kelembagaan politik.

Untuk terwujudnya demokrasi ekonomi menurut Ginandjar diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai tatanan kemasyarakatan Indonesia. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya hambatan intitusional, yang menyebabkan tidak berfungsinya (*disfunctioning*) institusi yang ada, yang pada kondisi yang relatif sama atau dapat diperbandingkan dengan intitusi di tempat atau negara lain ternyata dapat berfungsi dengan baik.

Di Indonesia pernah diterapkan konsep demokrasi terpimpin, sosialisme (Marxisme), berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) 'oldefos' (*old established forces*), dan 'nefos' (*new emerging forces*) dan sebagainya. Saat ini Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang menjalankan demokrasi secara penuh seperti yang dikehendaki konstitusi. Demokrasi ekonomi dalam rumusan UUD 1945 ; Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang

diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang”.

Secara tradisional hasil produksi merupakan fungsi dari tiga faktor, yaitu: (1) ketersediaan tenaga kerja, (2) ketersediaan modal, dan (3) ketersediaan teknologi. Untuk faktor yang pertama kita memiliki ketersediaan yang terbatas. Kegiatan produksi pada akhirnya haruslah dapat mencapai kombinasi yang optimum dari ketersediaan ketiga faktor produksi tersebut. Sehingga dapat mencapai tingkat produksi yang paling maksimal.

Dalam pasal 33 jelas tertulis pokok-pokok : pikiran bangsa Indonesia mengenai demokrasi ekonomi di sini tercermin hakikat demokrasi, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Unsur pokok bagi demokrasi ekonomi Indonesia adalah asas kekeluargaan. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme dan tidak sepaham dengan kolektivisme yang diajarkan oleh Marxisme.

Pasal 2 mengemukakan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi. Yang dimaksud dengan golongan-golongan ialah badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan badan kolektif yang lain. Pasal 23 dalam penjelasannya menyatakan bahwa dalam negara demokrasi atau dalam Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan DPR.

Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, juga menunjukkan sifat kerakyatan perekonomian Indonesia. Pasal 28, 29, ayat 1, dan 34 menunjukkan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan dan perikemanusiaan. Pasal 31 ayat 1 menyatakan pendidikan syarat mendasar bagi pembangunan bangsa dan bagi upaya membangun kemandirian yang merupakan unsur penting dalam demokrasi.

Dalam pembangunan ekonomi harus dihindari adanya neoliberalisme dan

etatisme yang menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antarpelaku ekonomi. Oleh karenanya secara tegas UUD 1945 dan GBHN menggariskan tentang perlunya pemihakan pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri. Serta pengusaha kecil yang unggul sebagai pelaku ekonomi rakyat di semua perekonomian nasional.

Dalam setiap perekonomian, paling sedikit dikenal tiga unsur kelembagaan, yaitu pelaku ekonomi, pasar, dan pengatur atau aturannya.

*Pelaku ekonomi* terdiri dari produsen dan konsumen, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

*Produsen.* Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dikenal tiga bentuk usaha, yaitu badan usaha milik negara (BUMN), usaha swasta, dan koperasi, yang berinteraksi dengan konsumen atau rumah tangga dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Usaha milik negara dapat berperan sebagai perintis usaha, pengelola bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, penyeimbang kekuatan di pasar, dan penunjang pelaksanaan kebijakan negara.

Usaha swasta berperan sebagai penggerak dinamika kegiatan ekonomi nasional. Sedangkan koperasi sebagai bangun usaha menurut UUD 1945 paling sesuai untuk demokrasi ekonomi, harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan sesuai dengan hakikatnya sebagai kesatuan ekonomi yang berwatak sosial.

*Konsumen.* Konsumen merupakan lembaga ekonomi yang penting pula ; mengingat pada dasarnya seluruh masyarakat melakukan kegiatan konsumen di berbagai bidang dan meliputi berbagai jenis kebutuhan.

Pola konsumsi seorang berbeda-beda disesuaikan oleh penghasilan yang diperolehnya (*budget constraint*).

Kepuasan optimal dapat tercapai apabila konsumen mempunyai pilihan yang luas dan memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang berbagai produk yang dipasarkan sehingga menghasilkan pola konsumsi yang betul-betul optimal.

Untuk menggairahkan pola konsumsi dalam negeri agar menunjang kegiatan produktif dan tidak semata-mata konsumtif, berperan pula dalam usaha membangun perekonomian yang sehat, yang artinya dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada secara efisien.

*Pasar.* Pasar merupakan lembaga perekonomian yang penting. Mekanisme pasar (yang oleh Adam Smith disebut tangan yang tidak tampak—*invisible hand*) merupakan proses interaksi para pelaku ekonomi dan menentukan volume produksi barang dan jasa serta harga menurut hukum permintaan dan penawaran.

Kegagalan besar menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan koreksi-koreksi dengan intervensi dari pemerintah melalui kebijakan publik. Dengan intervensi diharapkan ekonomi pasar dapat terkendali, dan dapat diarahkan menuju tujuan yang akan dicapai. Di Amerika misalnya, intervensi itu diwujudkan dalam berbagai peraturan seperti *anti trust law*. Intervensi pemerintah memperoleh dukungan kuat dengan penetapan teori Keynes dalam pengelolaan ekonomi, dengan memanfaatkan instrumen-instrumen fiskal dan moneter. Kemudian kepada yang tertinggal, termasuk kaum minoritas (etnik groups) diberikan bantuan khusus misalnya melalui *small business act*.

Tujuan demokrasi Indonesia ditunjukkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Monopoli pada dasarnya tidak dikehendaki, kecuali apabila betul-betul diyakini bahwa hanya dengan cara itu kepentingan rakyat banyak akan terpenuhi atau terlindungi.

“Demokrasi ekonomi melarang sistem persaingan liberalis, yang menumbuhkan penindasan, dan penghisapan terhadap manusia atau bangsa lain. Akan tetapi, kompetisi positif dan konstruktif untuk meninggikan mutu

barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi, tetap diperlukan.” (Ginandjar;1996).”

*Pemerintah.* Tanggung jawab pengendalian pasar sepenuhnya berada pada negara. Pemerintah dan aparat birokrasinya sangat penting dan menentukan bagi upaya mewujudkan tatanan perekonomian yang berlandaskan demokrasi ekonomi.

Ada 4 fungsi / peran strategis dari pemerintah dalam upaya menjabarkan demokrasi ekonomi menurut Ginandjar :

1. Penegakan hukum
2. Menciptakan persaingan yang sehat
3. Peranan redistribusi
4. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

*Penegakan hukum.* Demokrasi ekonomi tidak dapat dilakukan apabila sumber keadilan yang paling mendasar yaitu keadilan hukum, keadilan hukum adalah landasan bagi keadilan ekonomi. Hukum yang adil adalah prasyarat dari aturan main yang adil. Aturan main yang adil adalah prasyarat dari proses kegiatan ekonomi yang adil. Dan proses kegiatan ekonomi yang adil adalah prasyarat dari pembagian manfaat yang adil.

*Menciptakan persaingan yang sehat.* Mekanisme pasar pada dasarnya dapat digunakan untuk mencapai kemakmuran bersama. Tapi ada syarat yang penting yang harus dipenuhi, yaitu iklim persaingan yang sehat. Dengan adanya iklim persaingan yang sehat mencerminkan adanya keadilan dalam kesempatan untuk berkiprah dalam kehidupan ekonomi.

Suasana persaingan yang tidak sehat menghasilkan ketidakadilan dan tidak optimalnya penggunaan sumber daya yang ada. Persaingan yang tidak sehat dapat terjadi apabila terdapat pemusatan kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk, seperti monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan. Untuk itulah pemerintah bertugas untuk mengupayakan terwujudnya kekuatan yang seimbang diantara pelaku ekonomi.

*Peranan redistribusi.* Distribusi “kue nasional” akan menjadi lebih adil jika

kekuatan dan kesempatan berbagai pelaku ekonomi lebih kurang seimbang secara wajar. Harus ada pemihakan kepada pelaku ekonomi yang lemah kemampuannya, agar dapat berkembang sehingga mampu bersaing. Kebijakan dan pelaksanaan redistribusi harus sekaligus memperkuat kemampuan lapisan ekonomi rakyat untuk bersaing dan memperoleh kesempatan. Melalui fungsi ini negara mengarahkan aliran sumber daya untuk mengatasi kesenjangan, baik antardaerah, antarsektor, atau antargolongan pendapatan, dan mendemokratiskan kehidupan ekonomi.

*Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.* Pemenuhan kebutuhan rakyat harus merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan produktif rakyat sehingga ekonomi rakyat dapat berkembang dengan kekuatan yang bersumber dari dalam dirinya. Negara berperan dalam menyediakan pelayanan- pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perbaikan gizi, perumahan / pemukiman serta kesempatan kerja, dan lainnya bagi kelompok- kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tertinggal jauh di belakang dalam proses pembangunan.

Demokrasi ekonomi pada prinsipnya menjamin hak-hak warga negara, disertai pembatasannya, yang pada dasarnya adalah mencari upaya mencari keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat.

Ada tiga hal yang mutlak harus dihindari dan tidak boleh terjadi pada bangsa ini menurut Ginandjar yaitu

1. Sistem '*Free Fight Liberalism*'

Sistem ini menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. Sistem ini terkait dengan sistem ekonomi pasar yang terbukti lebih unggul dibandingkan dengan sistem Marxisme / Komunisme atau sistem ekonomi komando.

2. Sistem etatisme

Dalam sistem ini, negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara .

3. Persaingan tidak sehat

Persaingan dianggap tidak sehat bila terjadi pemusatan kekuatan ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Monopoli dan monopsoni, juga oligopoli dan oligopsoni, adalah produk mekanisme pasar yang melenceng, yang terjadi karena tidak ada atau kurang efektifnya kendali yang mencegah terjadinya penguasaan kekuatan pasar pada orang atau kelompok yang jumlahnya terbatas.

Pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan namun masih banyak kelemahan atau ketidaksesuaian dengan yang diharapkan. Keadaan ini disebabkan oleh :

1. Ada kekeliruan dalam kebijakan atau pendekatan.
2. Kebijakannya benar, tapi pelaksanaannya tidak berjalan seperti apa yang diharapkan.
3. Sejak semula memang pelaksanaannya menyimpang, yang dapat disebabkan oleh ketidakmampuan yang melaksanakan dan karena ada itikad buruk.

Hal ini sesuai dengan beberapa pendapat berikut :

Ekonom dari *Institute for Development Economy and Finance (Indeft)* Iman Sugema dalam Pikiran Rakyat mengungkapkan tanda-tanda bakal berulangnya krisis finansial bisa terjadi setiap saat, tetapi pola dan mekanisme krisis kali ini sedikit berbeda dibandingkan 10 tahun lalu. Persamaannya satu, akan terjadi pelarian modal keluar. Potensi krisis ekonomi jilid kedua, bahkan lebih besar dibandingkan krisis pertama yang terjadi tahun 1997 silam. Krisis ini diperparah dengan krisis kepemimpinan. Ketika krisis

kepemimpinan terjadi, elit politik, partai politik, bakal sulit menyamakan persepsi tentang potensi terjadinya krisis. Dikhawatirkan tidak ada kesamaan persepsi elit politik membuat pemerintah kehilangan momentum mencegah atau melemahkan potensi krisis.

Menurut pengamat ekonomi Djisman Simanjuntak, "tingkat daya saing Indonesia dalam kancah perekonomian dunia terancam akan terus merosot di masa mendatang. Pasalnya kondisi ekonomi nasional saat ini masih saja menunjukkan kinerja yang *intermediate* (sedang). Sehingga ekonomi nasional masih akan merangkak dalam jangka menengah, kira-kira 20 tahun mendatang. Kinerja ekonomi sekarang memang sedang-sedang saja, tidak buruk tetapi juga tidak cemerlang. Tapi dalam perspektif ke depan, dengan kinerja yang sedang. Sedang itu Indonesia akan terus menderita erosi daya saing di dunia, yang akan ditandai turunnya pangsa pasar dalam *out put* dunia baik dalam perdagangan dunia, maupun investasi asing langsung".

Beberapa indikator makro ekonomi memang sudah menunjukkan perbaikan, seperti inflasi yang menurun, stabilitas nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, keseimbangan neraca pembayaran, dan lainnya.

"Tapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebesar 6 % ini tidak mampu mengatasi persoalan sosial mendasar seperti masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan (Djisman : 2007)". Kinerja ekonomi Indonesia masih tergolong sedang-sedang saja. Begitu pun secara historis, pertumbuhan ekonomi kita selalu bergerak cepat dan padat, tetapi tiba-tiba mengalami penurunan yang tajam. Hal itulah yang menyebabkan daya saing kita terus melemah di pasar global selama ini. Apalagi persaingan yang sangat dominant justru terjadi pada kawasan Asia terutama Asia Timur.

Kondisi makin berat, apalagi pertumbuhan perdagangan dunia dalam tahun ini cenderung melemah dari 9,2 % dari tahun 2006 menjadi 7 % pada tahun 2007 ditambah lagi beberapa resiko kondisi ekonomi global seperti tingginya

harga minyak bumi, besarnya defisit perdagangan Amerika Serikat dan sebagainya

Sedangkan menurut Deputy Senior Bank Indonesia (B.I), Miranda Goeltom, pihaknya masih memproyeksikan *capital inflow* masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Sampai Juni *capital inflow* masih terus masuk dan akan terus masuk dan akan terus sampai akhir tahun. Akumulasi cadangan devisa kita masih tinggi. Melihat IHSG (indeks harga saham gabungan), berarti masih banyak aliran modal yang masuk. Aliran modal ini masuk karena faktor fundamental dan *policy* di Indonesia".

Perekonomian yang semakin terkonsolidasi dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga memberi ruang yang lebih luas bagi penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat fondasi ketahanan perekonomian nasional.

"Secara umum perekonomian Indonesia sampai dengan triwulan II 2007 berada pada jalur yang tepat, dengan ekspansi perekonomian yang terus berlanjut. Inflasi terkendali dan cenderung menurun. Stabilitas di pasar keuangan tetap terjaga sejalan dengan membaiknya kinerja perbankan. Selain itu kinerja neraca pembayaran Indonesia lebih baik dari perkiraan sebelumnya, yang ditandai dengan surplus dan posisi cadangan devisa yang terus meningkat, serta nilai tukar rupiah yang menguat. Berbagai hal tersebut diperkirakan akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berimbang pada 2007 dan 2008 (Budi Mulya : 2007)".

Menurut Ginandjar "Pertumbuhan ekonomi dalam sistem yang tidak mengindahkan partisipasi politik rakyat, cenderung menghasilkan kesenjangan antara yang memperoleh kesempatan dan yang tidak memperoleh kesempatan dalam sistem tertutup. Tidak terjadinya rembesan dalam pertumbuhan seperti yang diharapkan melalui paradigma '*trickle down*' adalah karena struktur kekuasaan menghambat terjadinya dampak rambatan dan pertumbuhan ekonomi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata

lain manfaat pertumbuhan ekonomi terbandung dalam struktur yang hanya memberi kesempatan pada lingkup yang terbatas.

Kemajuan ekonomi, untuk dapat berjalan secara berkesinambungan, harus didukung oleh sumber daya manusia, yang memiliki prakarsa dan daya kreasi untuk memajukan diri. Prakarsa itu hanya timbul apabila telah ada emansipasi serta kesempatan yang penuh untuk berpartisipasi dalam proses perubahan. Untuk itu diperlukan kebebasan dan kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri setiap individu dan masyarakatnya. Dalam ketiadaan kebebasan dan kesempatan ini, maka prakarsa dan daya kreasi juga menjadi terbatas. Karena manusia adalah makhluk yang utuh, tidak mungkin prakarsa dan daya kreasi berkembang untuk bagian tertentu dalam dirinya, dan tidak untuk bagian lain".

Upaya mengatasi kesenjangan harus dilakukan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan menyumbangkan dan mendinamisasikan potensinya.

Untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan berproduksi dan memantapkan fundamental ekonomi ada tiga hal pokok yang harus dikembangkan dan dilaksanakan yaitu :

1. Penertiban dan penyehatan keuangan negara.
2. Penggarapan masalah moneter dan dunia perbankan agar berjalan dengan baik dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap pengembangan sektor riil, usaha kecil, menengah, dan besar dengan keterkaitan yang erat dan saling menguntungkan.
3. Memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Haryono Suryono dalam Temu Nasional Ormas Karya-Kekaryaan sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, perlu ditetapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan berdimensi jauh ke depan. Untuk itu perlu dibentuk tim ekonomi yang handal, di bawah arahan kepemimpinan Negara yang visioner dan kredibel.
- b. Kebijakan ekonomi yang diambil harus dapat menghasilkan hal-hal berikut:
  1. Pengembangan usaha kecil dan menengah yang dapat memperkuat basis perekonomian rakyat.
  2. Peningkatan daya beli petani / nelayan yang selama ini terkena oleh biaya produksi yang tinggi sedangkan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan bernilai rendah.
  3. Peningkatan ketahanan pangan. Produksi pangan dalam arti luas hendaknya disesuaikan dengan kebutuhannya, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga harga pangan terjangkau oleh daya beli rakyat dan menguntungkan petani.
  4. Peningkatan keterkaitan usaha skala besar, menengah, dan kecil dalam mendorong mantapnya struktur perekonomian nasional yang produktif, efisien dan yang siap berkompetisi dalam era globalisasi.
  5. Peningkatan partisipasi dan kecintaan produk Indonesia terhadap produk-produk nasional yang kandungan lokalnya tinggi, mutunya makin meningkat dan harganya makin murah.
- c. Kebijakan yang ditempuh adalah:
  1. Pemantapan fundamental ekonomi (fiskal, moneter, dan neraca pembayaran) yang menghasilkan inflasi rendah, keuangan Negara yang sehat melalui peningkatan penerimaan pajak dan

penajaman prioritas pengeluaran, nilai tukar rupiah yang stabil, cadangan devisa yang memadai, peningkatan arus modal masuk, dengan prioritas pada investasi dan tabungan yang tinggi untuk menghasilkan infrastruktur yang kondusif guna mendukung pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri, dan ekonomi umumnya yang tinggi secara berkelanjutan.

2. Komitmen yang kuat terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia agar bisa memanfaatkan kesempatan kerja secara adil, mendapatkan upah yang tinggi, perbaikan tarap hidup, pengentasan kemiskinan, menciptakan pasar dalam negeri, dengan disertai pertumbuhan penduduk yang rendah dan jaring pengaman sosial yang memadai.
3. Kebijakan yang terarah untuk merangsang peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing dan berkembangnya mekanisme pasar yang baik.
4. Penyehatan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya guna pengembangan usaha kecil dan menengah untuk memperkuat basis perekonomian rakyat.
5. Dukungan sistem dan kelembagaan kondusif untuk merangsang 'good and clean governance' dan birokrat yang cerdas, bersih, berwibawa, gigh, tahu persoalan secara mendalam, mampu menyelesaikan 'home work', mampu 'getting things done', mampu merumuskan 'police', mampu membina 'public relation', mampu menjalankan 'administrative operation' mampu berdebat,

ulet, fokus, tekun, penuh integritas, menepati janji, sanggup membentuk 'team work' yang kompak dengan hubungan dunia internasional yang kuat dan disegani.

6. Pengelolaan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek hendaknya diarahkan pada upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan. Daya saing produk-produk nasional perlu ditingkatkan agar mampu berkompetensi dengan produk-produk luar negeri. Untuk meningkatkan kualitas produk diperlukan manusia-manusia yang produktif, kreatif, dan berprakarsa. Untuk itu diperlukan adanya jaminan kesempatan guna menikmati pendidikan dan pelatihan yang bisa meningkatkan kecerdasan bangsa.

Sistem ekonomi kapitalis terbukti memiliki kelemahan karena semua diserahkan kepada pasar. Bila pasarnya tidak stabil menimbulkan kesenjangan ekonomi. Begitupun dengan komunisme dan neoliberalism. Dalam neoliberalism semua diserahkan kepada pasar bebas dan tidak setuju dengan peran pemerintah, karena dianggap sebagai distorsi bagi kepentingan ekonomi.

Di era globalisasi saat ini sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia adalah ekonomi terbuka berkeadilan sosial. Dengan ekonomi terbuka setiap kerjasama dan kemitraan dalam ekonomi global, saat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Dengan sistem ekonomi terbuka berkeadilan sosial usaha pemerintah harus mampu melakukan pemerataan dan keadilan bagi rakyatnya. Untuk itu subsidi dilakukan pemerintah dalam hal ini. Pemerintah memberikan subsidi BBM hingga Rp 60 triliun, subsidi listrik Rp 23 triliun, subsidi pupuk, raskin, dan masih banyak lagi.

Perekonomian Indonesia masih bergejolak selama Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ketidakpastian sangat tinggi di tengah pergumulan politik dan buruknya praktik penegakan hukum.

Pembenahan ekonomi yang lebih tertata baru berlangsung pada era Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Menurut ekonom Faisal Basri, kala itu terjadi penjualan aset di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara besar-besaran. Sejumlah proyek macet akibat krisis tahun 1998 direstrukturisasikan. Lambat laun kita bisa keluar dari pusaran krisis walau dengan ongkos sangat mahal yang hingga sekarang masih terus kita bayar. Kestabilan makroekonomi makin terjaga. Hasilnya cukup menakjubkan: Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2004 mencapai 7,2 persen, angka pertumbuhan triwulan tertinggi pascakrisis yang hingga sekarang tak kunjung terlampaui, sekedar mendekati sekali pun.

Kita juga terhindar dari empasan krisis keuangan global tahun 2008. Boleh dikatakan sudah terhadirkan syarat perlu (*necessary condition*) yang dibutuhkan untuk akselerasi pertumbuhan dan pendalaman pembangunan.

Sentimen positif investor asing, terutama tentang prospek jangka panjang perekonomian Indonesia, masih belum mampu diarahkan untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan infrastruktur vital masih saja tersendat. Bukan karena kelangkaan dana, melainkan karena sangat lamban menghadirkan syarat-syarat pendukung.

Pasca berlakunya ACFTA Januari 2010 terjadi perubahan besar dalam konstelasi ekonomi dunia. Kekhawatiran dibanjirinya produk-produk China ternyata berubah cepat. Sekarang China berupaya memindahkan sebagian industrinya ke Indonesia. Situasi ini menguntungkan.

Dalam berbagai hal, misalnya dengan dukungan pasar domestik yang cukup kuat, sebenarnya Indonesia juga berpeluang. Kenyataan demikian mengharuskan kita untuk berpikir ulang. Bahwa betapapun dalam memasuki pasar global yang sangat kompetitif, kita harus berangkat dari keunggulan-keunggulan domestik sebagai dasar pijak kita untuk membangun daya saing. Keunggulan domestik itu tidak lain adalah ketersediaan faktor produksi dan pasar yang kita miliki

relatif berlimpah. Secara konseptual demokrasi ekonomi tidak bertentangan bahkan selaras dengan konsepsi membangun daya saing. Oleh karena itu membangun demokrasi ekonomi haruslah berlandaskan keunggulan-keunggulan yang dimiliki secara domestik.

Dalam perekonomian dunia tidak dapat dihindari kecenderungan ke arah pasar bebas yakni sistem perdagangan tanpa hambatan, baik hambatan yang dibuat oleh negara ataupun oleh kelompok negara. Namun setiap negara memiliki kedaulatan, termasuk kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi tidak dapat dilepaskan pada mekanisme pasar semata karena negara ini dibangun dengan cita-cita dan idealisme. Pasar yang bebas cenderung akan memperkuat kedudukan yang telah kuat, sehingga menjurus ke arah peran serta dan penguasaan pasar oleh jumlah orang yang terbatas. Kegagalan pasar itu menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan koreksi-koreksi dengan intervensi-intervensi dari pemerintah melalui berbagai kebijakan publik, yang sebenarnya dalam teori aslinya tidak dikehendaki (Ginanjari, 2007).

Saat ini dengan era perdagangan bebas, setiap negara memberlakukan *safe guard* untuk melindungi pasar domestiknya.

Dalam perkembangan ekonomi banyak kelompok masyarakat telah bangkit. Mereka mulai mengambil inisiatif, aktif, kritis, dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Ini sangat baik dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sebenarnya.

#### IV. SIMPULAN

Pemerintah telah menentukan kebijakan ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat. Saat ini sistem ekonomi yang dianut bangsa Indonesia adalah ekonomi terbuka berkeadilan sosial. Dengan ekonomi terbuka, setiap kerja sama dan kemitraan dalam ekonomi global, sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan sistem ekonomi terbuka berkeadilan sosial

... pemerintah harus mampu melakukan pemerataan dan keadilan bagi rakyatnya.

Dalam perkembangan ekonomi, masyarakat mulai mengambil inisiatif, kritis, dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Green, Philip. 1993, *Democracy: Key Concept in Critical Theory*. New Jersey: Humanities Press.
- Haggard, Stephan dan Steven B. Webb (ed) 1994 *Voting for Reform: Democracy, Political Liberalization, and Economic Adjustment*. New York: Oxford University Press.
- Kartasamita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: Cides.
- 2007. *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*. Diskusi Nasional ICMI. Jakarta.
- Kompas, 25 Oktober 2010. *Masih Banyak Kesempatan Jika Mau Berubah*.
- Pikiran Rakyat, 26 Juni 2007, "Defisit APBN-P 2007 Melebihi Target".
- 6 Juli 2007, "Semakin Kuat, Pertanda Krisis Terulang Lagi".
- 6 Juli 2007, "BI Rate" Menjadi 8,25 %.
- 19 Oktober 2010. *Konstelasi Ekonomi Berubah*.
- Suryono, Haryono, 2003. *Bersatu Mengatasi Krisis dan Bangkit Membangun Bangsa*, Bandung.
- William, Raymond. 1976 "Democracy" in *Keywords*: London: Fontana / Croom.

### Riwayat Penulis :

Hj. Aini Kusniawati, Dra., M.M.  
Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Galuh